

PERISTIWA NI NI-ROKU TAHUN 1936 DAN HUBUNGANNYA TERHADAP MILITERISME JEPANG

Mochammad Imaduddin Sholeh Al Alify

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Email: mochammad.19061@mhs.unesa.ac.id

Nasution

S-1 Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Email: nasution@unesa.ac.id

Abstrak

Gerakan Restorasi Showa muncul di Jepang pada tahun 1930-an terinspirasi pada Restorasi Meiji tahun 1889 dengan visi berusaha mengembalikan Kaisar Hirohito ke kekuasaan absolut dan secara radikal mengubah sistem sosial, ekonomi, dan politik Kekaisaran Jepang. Gerakan Restorasi Showa muncul akibat kesenjangan sosial dan perselisihan ideologi politik. Faksionalisme muncul akibat pro-kontra dari gerakan tersebut yang mengakibatkan lahirnya perkumpulan aktivis perwira muda (Seinen Shoko Undo). Gerakan Perwira Muda mencoba melakukan beberapa upaya kudeta dan pembunuhan figur politik dan militer Jepang disepanjang tahun 1930-an. Upaya pembunuhan dan kudeta terbesar serta terakhir dari perwira muda adalah Peristiwa Ni Ni-Roku (Insiden 26 Februari). Berdasarkan beberapa surat kabar dari arsip digital Hoji Shinbun, pemberontakan tersebut melibatkan setidaknya 1.400 tentara, menduduki beberapa titik penting pemerintahan di Tokyo, serta membunuh sejumlah pejabat tinggi. Setelah kudeta tersebut, angkatan darat semakin memperkuat pengaruhnya dalam arah politik Jepang. Pengaruh tersebut diantaranya seperti pemilihan menteri kabinet, doktrin ekspansi, dan biaya militer.

Kata Kunci: Restorasi Showa, Insiden 26 Februari, Kodoha, Militerisme

Abstract

Showa Restoration movement emerged in Japan in the 1930s inspired by the Meiji Restoration of 1889 with the vision of attempting to return Emperor Hirohito to absolute power and radically change the social, economic, and political system of the Japanese Empire. Showa Restoration Movement emerged as a result of social inequality and clashes between political ideologies. Factionalism emerged as a result of the pros and cons of the movement which resulted in the birth of the young officer movement (Seinen Shoko Undo). The Young Officers Movement attempted several coup and assassinations of Japanese political and military figures throughout the 1930s. The largest and last assassination attempt and coup of young officers was the Ni Ni-Roku Jiken (26 February Incident). Based on several newspapers from the Hoji Shinbun digital archive, the rebellion involved at least 1,400 soldiers, occupied several key government buildings in Tokyo, and killed a number of high-ranking officials. After the coup, the army further strengthened its influence in Japanese politics. These influences include the selection of cabinet ministers, expansion doctrine, and military budget.

Keyword: Showa Restoration, 26 February Incident, Kodoha, Militarism

PENDAHULUAN

Memasuki abad 19, Jepang melewati masa transformasi besar-besaran. Hanya dalam beberapa dekade, Jepang telah berubah dari sebuah negara feodal tertutup menjadi negara modern monarki konstitusional berparlemen, dengan kaisar sebagai kepala negara dan tokoh yang didewakan. Segala transformasi sosio-politik ini tidak luput dari pengaruh pengembalian kekuasaan kepada kaisar Jepang dalam apa yang disebut sebagai Restorasi Meiji.¹ Namun, Restorasi Meiji ini bukanlah satu-satunya gerakan restorasi kekaisaran dalam sejarah Jepang modern. Beberapa dekade setelahnya, menjelang perang dunia kedua kondisi sosio-politik Jepang mendorong munculnya faksi yang berorientasi pada apa yang mereka sebut sebagai Restorasi Showa.

Menjelang perang dunia kedua, angkatan perang Kekaisaran Jepang bukan sebuah entitas tunggal yang bahu-membahu tunduk terhadap pemerintah pusat. Terdapat banyak elemen-elemen dalam militer yang saling bersinggungan. Gerakan Restorasi Showa ini juga menjadi latar belakang faksionalisme dalam tubuh Angkatan Darat, terdapat dua faksi politik perwira yang saling berseberangan. Faksi pertama ialah faksi *Kodoha* (Faksi Jalan Kekaisaran) yang didominasi golongan perwira muda. Faksi kedua adalah faksi *Toseiha* (Faksi Kontrol) yang mendorong disiplin Angkatan Darat. Perselisihan ini, menyeret pula pandangan doktrin ekspansi Kekaisaran Jepang dalam tubuh Angkatan Darat kala itu.²

Keterkaitan sejarah yang menghubungkan Restorasi Meiji tahun 1889 dengan Restorasi Showa pada tahun 1930-an bukanlah hal yang sederhana, tetapi terdapat berbagai peristiwa-peristiwa kunci yang menjadi pengukur keberhasilan atau kegagalan dari gerakan tersebut. Terjadinya peristiwa *Ni Ni-Roku* (Insiden 26 Februari 1936) yang dilakukan oleh perwira-perwira muda faksi *Kodoha*, menjadi peristiwa terakhir dan paling signifikan dalam gerakan tersebut.³

Peristiwa *Ni Ni-Roku* dinilai dapat menggambarkan kerumitan politik dan militer Jepang pada tahun 1930-an. Adapun kelompok yang terlibat pada peristiwa *Ni Ni-Roku* secara tidak langsung juga dapat dijadikan sebagai salah satu gambaran bagaimana karakter tentara Jepang dalam penjajahan di Indonesia. Karena jika dilihat dari perspektif sejarah Indonesia, tahun 1930-an adalah periode penting dalam sejarah Jepang maupun sejarah Indonesia. Perkembangan Jepang pada waktu tersebut menyebabkan keterlibatan Jepang dalam perang dunia kedua, dan berdampak besar pada sejarah negara tersebut dan sekitarnya selama beberapa dekade berikutnya. Sehingga, dapat dikatakan peristiwa *Ni Ni-Roku* sebagai salah satu peristiwa yang membentuk Jepang selama periode ini, dan mempengaruhi keterlibatan negara tersebut dalam salah satu

konflik terbesar abad ke-20, sekaligus memberikan gambaran keterkaitan yang berimbas pada penjajahan Jepang di Asia Tenggara.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan yakni heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.⁴ Tahapan pertama adalah heuristik, dimana dilakukan pengumpulan data primer, maupun sekunder yang ditemukan di berbagai sumber. Sumber yang kami peroleh adalah sumber berupa surat kabar diaspora Jepang-Amerika berbahasa Inggris dari arsip *Hoji Shinbun Digital Collection* yang dinaungi oleh *Hoover Institution*, dengan fokus pengumpulan berkaitan dengan topik peristiwa *Ni-Ni Roku*. Sumber tersebut dipilih dengan pertimbangan ketersediaan sumber yang paling mudah diakses serta relevansi surat kabar tersebut yang diterbitkan diaspora Jepang di Amerika Serikat, sehingga memberikan perpaduan gambaran dan sudut pandang peristiwa. Sementara itu, sumber yang digunakan dalam sumber sekunder berupa buku, Jurnal, dan artikel diantaranya seperti buku yang ditulis Ben Ami Shillony tahun 1973 yang berjudul *Revolt in Japan: The Young Officers and the February 26, 1936 Incident* yang berfokus pada Gerakan Perwira Muda dalam peristiwa *Ni-Ni Roku* sebagai sumber sekunder utama, buku ini dipilih dengan pertimbangan buku tersebut memberikan penjelasan yang mendalam dan komprehensif tentang peristiwa tersebut menggunakan berbagai sumber, termasuk memoar, surat kabar, dan arsip militer, untuk memberikan analisis yang mendalam. Sementara itu, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji tahun 2011 oleh Kustiawan berjudul *Analisa Politik Kegagalan 'Restorasi Showa' Dalam Peristiwa 26 Pebruari (1936)* menjadi sumber sekunder sekaligus sebagai acuan yang dikembangkan dalam penelitian ini.

Tahapan selanjutnya adalah kritik sumber, Pada tahap ini, sumber dan data yang telah diperoleh diuji kredibilitasnya sehingga mampu menghindarkan dari penyesatan informasi. Kritik eksternal berfokus pada analisis wujud dan bentuk dari dokumen sumber sejarah untuk memastikan keabsahan dan autentisitasnya. Kritik intern berkaitan dengan analisis isi dari sumber sejarah dilakukan untuk menguji kredibilitas atau kesahihan isi sumber baik sumber primer seperti dokumen dan arsip maupun sumber pendukung lain seperti jurnal, buku, dan lain-lain. Kesenambungan antar sumber diuji kredibilitasnya apakah sesuai atau tidak dengan masing-masing sumber satu sama lain yang telah didapat terlebih dahulu.

Setelah diuji keasliannya, data yang diperoleh ditafsirkan dalam tahap interpretasi. Tujuan dari penafsiran ini adalah agar setiap uraian fakta yang terpisah dan

¹ Oktorino, Nino. 2013. *Konflik Bersejarah: Runtuhnya Hindia Belanda*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, hlm. 23-24..

² Shillony, Ben Ami. 1973. *Revolt in Japan and The Young Officers*. New Jersey: Princeton University Press, hlm.38.

³ Kustiawan. 2011. *Analisa Politik Kegagalan 'Restorasi Showa' Dalam Peristiwa 26 Pebruari (1936)* (Studi Tentang Peran Politik Militer Jepang pada Pemerintahan Showa). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, hlm. 2.

terpencar bisa dijadikan menjadi satu kesimpulan yang runtut dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Kesimpulan ini kemudian diolah lebih lanjut dalam tahap historiografi. Pada tahap interpretasi ini, setiap data dan fakta yang telah diuji saat proses verifikasi dikaitkan dan ditafsirkan. Data-data primer dikaitkan menjadi rangkaian sesuai dengan tuntutan waktu serta relevansi peristiwa yang kemudian melalui proses tafsir dan interpretasi peneliti.

Tahap terakhir dalam metode penelitian sejarah adalah tahap penulisan atau historiografi. Tahap historiografi adalah tahap dimana data yang telah ditafsirkan ditulis sebagai karya tulis atau laporan ilmiah. Setelah diuji dan ditafsirkan sebelumnya, data disusun secara sistematis, kronologis, dan rasional sehingga mampu memenuhi sebuah kepenulisan sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Restorasi Showa dan Lahirnya Faksionalisme Militer

Pembentukan pemerintahan baru dibawah kaisar pada tahun 1868 menandai awal periode Meiji, yang umumnya dikenal sebagai Restorasi Meiji.⁴ Segala bentuk kebijakan pemerintahan baru ini berorientasi untuk belajar dari perkembangan bangsa Barat, sehingga dapat memperkuat Jepang dan membuatnya setara dengan bangsa-bangsa kolonial Eropa. Jepang memulai pembangunan seperangkat lembaga politik baru yang sesuai dengan prinsip negara-bangsa modern, termasuk konstitusi, dan badan legislatif nasionalnya, Diet, didirikan pada tahun 1890. Konstitusi Meiji juga disahkan dari berbagai partai politik dan parlemen yang dipilih. Konstitusi ini dipresentasikan pada tahun 1889, menyatakan bahwa otoritas tertinggi ada pada kaisar.⁵ Kaisar mampu menunjuk perdana menteri, mengontrol militer, dan membubarkan parlemen jika dia pikir perlu. Dibawahnya, terdapat parlemen legislatif yang terdiri dari dua majelis. Majelis tinggi termasuk anggota bangsawan ditunjuk oleh kaisar, sementara perwakilan majelis rendah dipilih dengan suara mayoritas (dipilih oleh laki-laki yang membayar pajak setidaknya 15 yen saat itu, atau sekitar 5 persen dari total populasi laki-laki).⁶

Ketika memasuki periode Taisho, Jepang awalnya menjadi negara yang stabil dan makmur. Politisi partai sebagai pejabat terpilih memperoleh pengaruh selama tahun 1910-an. Birokrat sebagai pejabat negeri bekerja sama dengan Politisi memperoleh kekuasaan dan mensponsori proyek pembangunan lokal dan regional dengan kemampuan untuk memveto anggaran. Masa ini disebut "Demokrasi Taisho".

Di sisi lain terdapat tokoh politik dan militer Jepang lain yang merasa Jepang tidak diperlakukan setara dalam komunitas internasional. Bangsa barat menolak klausul kesetaraan ras pasca berakhirnya perang dunia pertama. Begitu pula pandangan ketidaksetaraan dalam konferensi angkatan laut.

Walau terdapat upaya perluasan demokratisasi politik di Jepang pada masa Taisho tersebut, kondisi Jepang pada akhirnya semakin bermasalah pasca memburuknya perekonomian dalam negeri sejalan dengan gempa besar Kanto dan krisis ekonomi dunia pada 1920-an. Politisi pasifis yang bekerjasama dengan komunitas internasional disalahkan atas krisis ekonomi.

Di masa-masa peralihan antara periode Taisho dan Showa, peristiwa depresi besar dan Gempa Bumi Besar Kanto, serta ketidakmampuan mengikuti naik turunnya perekonomian ekstrem semakin mempengaruhi kehidupan masyarakat kelas bawah, sementara kaum industri masih agak diuntungkan karena memperoleh dukungan pemerintah sebagai bagian dari mesin perang Jepang.

Ketika memburuknya kondisi sosio-ekonomi Jepang mendorong munculnya kelompok yang mengadvokasikan restorasi ulang. Ketika kaisar Hirohito naik tahta dan Jepang memasuki era Showa, istilah Restorasi ini diadopsi untuk merujuk pada perubahan dalam kehidupan politik, sosial, dan budaya Jepang, di mana negara tersebut akan membubarkan institusi-institusi gaya barat yang ditiru oleh Jepang, seperti kapitalisme dan liberalisme, dan kembali ke jati dirinya seperti yang diwujudkan sebelumnya dalam Restorasi Meiji.⁷

Gerakan Perwira Muda (*Seinen shoko undo*) lahir di Akademi Militer di Tokyo pada pertengahan tahun 1920-an di masa peralihan Taisho-Showa. Ketika kebijakan dianggap sangat liberal, parlementer, diplomatis, dan pengaruh Barat mencapai puncaknya, tetapi disisi lain juga merupakan masa meningkatnya permasalahan sosial ekonomi, yang dipicu oleh krisis ekonomi global dan gempa bumi besar Kanto. Menurut kelompok perwira muda, politisi, *zaibatsu*, serta beberapa anggota istana, dianggap mengikuti kepentingan pribadi sementara mayoritas rakyat Jepang dibiarkan menderita, terutama di daerah pedesaan. Kemiskinan rakyat sangat akut setelah masalah bertubi-tubi seperti gempa besar Kanto, depresi besar, serta hasil panen yang buruk.

Kebijakan-kebijakan yang diterapkan saat itu dianggap memberatkan golongan petani. Hal ini diperparah dengan jatuhnya harga pasar dunia untuk komoditas padi dan sutra yang merupakan komoditas utama petani akibat krisis ekonomi global.⁸ Sementara golongan industri diuntungkan sebagai penggerak kepentingan perang Jepang. Karena akibat krisis ekonomi di dalam negeri tersebut, Jepang dipengaruhi oleh kekuatan kelompok industri *zaibatsu* semakin mengobarkan perang dengan dalih memperbaiki ekonomi.

Berbagai peristiwa yang mempengaruhi kondisi Jepang melahirkan Gerakan Perwira Muda. Gerakan ini merupakan sebuah organisasi yang terdiri dari para perwira aktivis, dimana sebagian dari perwira muda ini merasa prihatin dengan kemiskinan masyarakat. Yang mana sekitar

⁴ Sims, Richard. 2001. *Japanese Political History Since the Meiji Restoration, 1868-2000*. New York: Palgrave, hlm. 1-12.

⁵ *Ibid*, hlm. 40-74.

⁶ Segal, E. 2015. "Meiji and Taishō Japan: An Introductory Essay", hlm. 5.

⁷ Shillony, Ben Ami. *op. cit.*, hlm. 57-58.

⁸ *Nichibei Shinbun*, 28 Februari 1936.

80% prajurit kekaisaran Jepang saat itu berasal dari masyarakat kelas bawah yang terpengaruh krisis ekonomi.⁹ Sehingga dapat dikatakan terdapat hubungan yang kuat antara radikalisasi perwira-perwira muda saat itu dengan kondisi ekonomi Kekaisaran Jepang.

keterlibatan perwira muda dalam pembunuhan dan percobaan kudeta mulai muncul dengan terjadinya Insiden 15 Mei 1932 (*Goichigo Jiken*). Peristiwa tersebut terjadi karena ketidakpuasan golongan perwira muda dalam angkatan laut terhadap kebijakan luar negeri Jepang yang menuruti tuntutan bangsa barat dalam Perjanjian Angkatan Laut London. Peristiwa 15 Mei yang dilakukan oleh kelompok perwira muda radikal membunuh Perdana Menteri Tsuyoshi Inukai ini menjadi salah satu insiden yang dipengaruhi oleh Gerakan Restorasi Showa.¹⁰

Pembunuhan perdana menteri Inukai tahun 1932, pendudukan Korea dan Manchuria, monopoli tanah dan komoditas oleh golongan kapitalis dan industri, serta tidak adanya alternatif lain sebagai wujud protes pemuda terhadap ekonomi dengan dilarangnya gerakan ideologi kiri, secara langsung menjadi sebab semakin besarnya dukungan terhadap Restorasi Showa oleh golongan perwira muda di dalam kemiliteran.

Pada masa-masa tersebut itulah, Restorasi Shōwa (*Shōwa Ishin*) diperkenalkan oleh penulis Jepang Kita Ikki, dengan tujuan mengembalikan kekuasaan kepada Kaisar Hirohito dan menghapuskan sistem demokrasi liberal.

Sebagai negara modern pertama di Asia, Kita Ikki meyakini bahwa Jepang memiliki tanggung jawab untuk membebaskan negara-negara Asia lainnya. Ia menekankan bahwa tujuan utama Restorasi Showa tidak hanya untuk melayani kepentingan nasional Jepang, tetapi juga untuk mengungkapkan simpati kepada saudara Cina dan mendukung masa depan yang lebih baik bagi kedua negara.¹¹

Restorasi Showa menggagas tentang negara yang tidak didasarkan pada identitas etnis atau ras. Bahwa rasialisme bukan merupakan bagian dalam konstitusi negara Jepang modern. Ia mencoba mendiskreditkan anggapan umum bahwa negara Jepang selalu merupakan bangsa etnis yang homogen. Menurutnya, orang yang bukan etnis Jepang harus diizinkan menjadi anggota penuh negara Jepang. Bahwa semua etnis yang berada di wilayah Jepang, baik itu etnis timur Cina dan Korea, maupun etnis Eropa dan Afrika, diperkenankan menjadi warga negara Jepang yang memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan etnis Jepang.¹²

Kekaisaran Jepang ini diimpikan sebagai negara yang adil dan bukan negara yang suka mengeksploitasi seperti bangsa barat. Peran Jepang sebagai pemersatu Asia mengharuskannya untuk mendukung perjuangan kemerdekaan India serta mengakhiri pengaruh kekuatan Barat di Cina. Menurutnya, Jepang yang mewakili proletariat dunia harus bersekutu dengan Amerika Serikat, dan menggunakan

kekuatan angkatan laut untuk menghancurkan armada borjuis kapitalis Inggris dan mengalahkan tuan tanah feodal Rusia.¹³

Secara internal kebijakan pemerintahan Jepang sendiri, Restorasi Shōwa menuntut pemulihan total kekuatan politik, ekonomi, dan militer untuk Kaisar Hirohito, para anggota istana dan pemimpin militer yang dianggap setia. Di mata para pendukung Restorasi, kabinet berbasis partai politik yang terdiri dari para politisi pada masa itu dinodai oleh kepentingan kekayaan, dan ketergantungan mereka pada *zaibatsu* industri Jepang.

Dalam Restorasi Showa, kepemilikan aset dan tanah pribadi harus dibatasi. Sisa properti kemudian dinasionalisasi dan dijalankan oleh pemerintah, yang akan mengatur perekonomian nasional. Hak pilih politik harus diperluas ke seluruh warga negara laki-laki di atas dua puluh lima tahun. Negara harus menyediakan layanan kesejahteraan sosial, pendidikan gratis untuk semua golongan tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan, lapangan kerja yang adil, dan pembagian keuntungan yang setara antara pemilik usaha dan tenaga kerja.

Ada dua tujuan khusus dalam gagasan revolusi Kita Ikki, yaitu mengakhiri pengaruh oligarki dan membangun kembali persatuan sejati antara penguasa dan rakyat. Pendukung Restorasi Shōwa meyakini bahwa setelah kekuasaan absolut dikembalikan kepada kaisar, dia akan melakukan reformasi sosial yang diperlukan, dimulai dengan reformasi tanah untuk meringankan kemiskinan.

Singkatnya, gerakan tersebut muncul dengan keinginan untuk mengulangi Restorasi Meiji dan mengantagoniskan terhadap kelas-kelas elit. Didukung oleh anti-kapitalisme dan kesetaraan terhadap penduduk pedesaan, patriotisme yang kuat terhadap negara dan kaisar, serta kepercayaan spiritual mengenai takdir Jepang sebagai "negeri proletar" dalam membebaskan Asia dan dunia dari dominasi "kelas elit".

Jika ditelaah lebih dalam lagi, para perwira muda ini sebenarnya tidak memiliki ideologi pemersatu sejati, tetapi lebih dimotivasi oleh keyakinan sederhana bahwa ada sesuatu yang busuk di Jepang, dan bahwa pengaruh korup ini sedang menghancurkan bangsa. Ide-ide ini terkadang disatukan sebagai apa yang disebut sebagai gerakan "Restorasi Shōwa". Menuntut pengaruh korup harus dibersihkan dari masyarakat, dan kekuasaan sejati harus dikembalikan kepada Kaisar. Setelah Restorasi Showa, kaisar dianggap tidak akan lagi disesatkan oleh penasihatnya yang "jahat dan korup", sehingga memimpin Jepang menuju masa depan utopis. Walaupun para perwira ini pada umumnya memiliki cita-cita yang sama, banyak dari kekerasan yang diarahkan pada para pemimpin politik senior Jepang oleh para perwira junior ini kurang memiliki banyak rencana tindak lanjut, dengan asumsi yang hampir naif

⁹ Kashu Mainichi Shinbun, 21 Agustus 1932.

¹⁰ The Nippon Jiji, 26 September 1933.

¹¹ Orbach, D. 2011. A Japanese prophet: eschatology and epistemology in the thought of Kita Ikki. In *Japan Forum*, hlm. 349.

¹² Skya, Walter. 2009. *Japan's Holy War: the ideology of radical shinto ultranationalism*. Durham: Duke University Press, hlm. 124.

¹³ *Ibid.*, hlm. 354..

bahwa setelah penasihat jahat telah disingkirkan, Restorasi Shōwa secara alami akan mengikuti.

Dalam tubuh Angkatan Darat, banyak aktivis muda tergabung dalam Faksi *Kodoha* lebih cenderung ke arah revolusi pengembalian kekuasaan tunggal kepada kaisar dengan menggulingkan dominasi kelas elit dan *zaibatsu*, sebagai apa yang mereka sebut sebagai Restorasi Showa. Sementara faksi *Toseiha* memandang bahwa perang membutuhkan kerja sama dengan birokrasi dan *zaibatsu* untuk memaksimalkan kapasitas industri dan militer Jepang.

Adapun Nama "*Kodoha*" (Faksi Jalan Kekaisaran) berasal dari Menteri Perang Jenderal Sadao Araki, yang memiliki kecenderungan untuk mendeskripsikan banyak hal dengan istilah *Kodo* (kekaisaran).¹⁴ Sementara *Toseiha* (Faksi Kontrol) adalah gerakan reaksioner yang tergabung sebagai oposisi terhadap *Kodoha*.

Saat Araki diangkat sebagai Menteri Perang untuk kabinet Inukai disepanjang tahun 1931-1934, kebijakan Araki dalam Kementerian Peperangan difokuskan pada mempersiapkan Jepang untuk perang dengan Uni Soviet, dimana Araki dan sekutunya menyatakan bahwa krisis diplomasi Russo-Jepang akan muncul pada tahun 1936. Araki menekankan bahwa ketergantungan perang pada moral superior prajurit infanteri Jepang untuk mengatasi kekurangan materi. Hal ini bertentangan dengan perwira lain yang menginginkan modernisasi tentara dengan memperluas dan mengembangkan teknologi Jepang melalui industri dalam persiapan untuk perang di masa depan. Sebagai bagian dari fokus persiapan perang dengan Uni Soviet, Araki dan banyak sekutu *Kodoha* menjadi pendukung kebijakan perdamaian terhadap Cina, dengan alasan bahwa Cina lebih dibutuhkan sebagai sekutu dan mitra melawan Soviet daripada target untuk dieksploitasi sumber dayanya dalam jangka pendek.

Namun, Staf Jenderal Angkatan Darat tidak sepenuhnya menyetujui keyakinan Araki. Sebagai upaya untuk menegakkan gagasan reformasinya, Araki bertindak agresif dengan mendorong keluar banyak perwira untuk diganti dengan sekutunya sendiri, tanpa memperhatikan pertimbangan politik yang sensitif.¹⁵ Hal inilah yang pada akhirnya mengarah pada pembentukan *Toseiha* dari perwira yang telah didorong keluar dari posisi kunci atas ketidaksepakatan terhadap pandangan kebijakan militer Araki. Araki mengundurkan diri dari posisinya sebagai Menteri Perang pada tahun 1934 Setelah gagal meyakinkan kabinet untuk peningkatan dana militer demi mempersiapkan rencana perang melawan Uni Soviet.¹⁶

Penggantinya, Jenderal Hayashi Senjuro, menunjuk penentang lain dari gagasan Araki ke posisi kunci militer. Salah satunya adalah Jenderal Tetsuzan Nagata sebagai Kepala Biro Urusan Militer. Nagata bersama dengan banyak perwira tinggi militer lainnya di *Toseiha* khawatir dengan

keinginan *Kodoha* yang tampak ingin memulai perang melawan Uni Soviet, bertentangan dengan penekanan Nagata pada perlunya persiapan perang yang lebih matang.¹⁷ Banyak perwira muda menyalahkan pemecatan Araki merupakan konspirasi oleh anggota *Toseiha*. Perselisihan kemudian semakin terekskalasi akibat pemecatan beberapa sekutu Araki yang tersisa, yang mana para perwira muda melihat ini sebagai pembersihan perwira *Kodoha*.¹⁸

Kodoha dan *Toseiha* juga berbeda dalam metode untuk mencapai tujuan. Walau secara umum keduanya adalah kaum yang dianggap fasis atau ultranasionalis dan anti-liberal. Faksi *Kodoha* cenderung menggunakan kekerasan. Sebagai tokoh penting dalam *Toseiha*, Tetsuzan Nagata sendiri dibunuh pada 12 Agustus 1935 oleh perwira radikal *Kodoha* bernama Aizawa Saburo, dalam apa yang disebut sebagai Insiden Aizawa (*Aizawa jiken*). Peristiwa pembunuhan Mayor Jenderal Tetsuzan Nagata oleh Kolonel Aizawa menjadi salah satu dampak dari faksionalisme Angkatan Darat ini, sekaligus juga menjadi salah satu dari berbagai aksi faksi *Kodoha* yang dilatarbelakangi oleh Gerakan Restorasi Showa.¹⁹

Pelaksanaan persidangan untuk Aizawa bersifat publik, dan yang dilaksanakan di markas besar Divisi Pertama Angkatan darat yang didominasi simpatisan *Kodoha*.²⁰ Persidangan tersebut bahkan memperoleh simpati dari masyarakat. Tetapi sebelum persidangan mencapai pendakwaan, para perwira muda dan anggota *Kodoha* dari Divisi Pertama mendengar kabar bahwa mereka akan dikirim ke Manchuria pada musim semi tahun 1936.²¹ Dalam hal ini berarti Perwira Muda akan kehilangan akses ke eselon tertinggi militer dan pemerintahan sipil di ibukota, dan dengan demikian sangat memperkecil kesempatan untuk mewujudkan Restorasi Showa. Tanpa sekutu yang tersisa, para perwira muda memilih upaya kudeta untuk membersihkan lawan politik dan mewujudkan Restorasi Shōwa. Ini akan menjadi asal mula Insiden Ni Ni-Roku (26 Februari).

Pecahnya Pemberontakan Ni Ni-Roku Akibat Faksionalisme

Setelah Insiden Aizawa, beberapa anggota Gerakan Perwira Muda bertemu. Mereka memutuskan bahwa pemberontakan harus dilakukan sebelum akhir persidangan Aizawa, memanfaatkan sebesar mungkin opini publik yang bersimpati. Tujuh "penjahat negara" dipilih sebagai target. Mereka adalah Perdana Menteri Okada Keisuke, Menteri Keuangan Takahashi Korekiyo, *Genrō* Pangeran Saionji Kinmochi, Inspektur Jenderal Akademi Militer Watanabe Jotaro, Pemegang Segel Penasihat Kekaisaran Saito Makoto, Bendaharawan Agung Kekaisaran Laksamana Suzuki Kantaro, dan mantan Pemegang Segel Penasihat Kekaisaran

¹⁴ ¹⁴ Shillony, Ben Ami. *op. cit.*, hlm. 31.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 29-30.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 43.

¹⁷ Sims, Richard. *op. cit.*, hlm. 193

¹⁸ Palasz-Rutkowska, E. *op. cit.*, hlm. 144-145.

¹⁹ *Shin Sekai Asahi Shinbun*, 29 Januari 1936.

²⁰ Shillony, Ben Ami. *op. cit.*, hlm. 113..

²¹ Palasz-Rutkowska, E. *op. cit.*, hlm. 148.

Makino Nobuaki. Upaya pembunuhan terhadap Pangeran Saionji dibatalkan di saat-saat terakhir. Pangeran Saionji, meskipun sangat dibenci oleh para perwira muda, adalah orang yang dianggap berpengaruh dalam memutuskan siapa yang akan menjadi Perdana Menteri. Beberapa komplotan pemberontak ingin dia dihapus dari target dan dipaksa untuk merekomendasikan pilihan pemberontak sebagai Perdana Menteri.²²

Setidaknya terdapat 19 perwira, terutama dari Resimen Infanteri Pertama dan Ketiga, ditambah dengan 2 sipil mantan perwira, yang setuju ikut serta memimpin pemberontakan. Para bintang di bawah komando pemberontak dikumpulkan dan diberi tahu tentang pemberontakan dan tujuannya. Mereka diberi pilihan untuk bergabung atau pulang. Sebagian besar dari mereka bergabung. Mereka yang memilih untuk pulang tidak melakukan apa pun untuk menghentikan aksi tersebut atau melaporkan pihak berwenang.²³ Para pemberontak memilih slogan pemberontakan "*Sonno Tokan*" (pujilah kaisar, hancurkan para pengkhianat), yang merupakan parafrase dari slogan Restorasi Meiji. Pasukan pemberontak menyebut dirinya *gigun* (tentara keadilan).²⁴ Pemberontakan dimulai pada dini hari tanggal 26 Februari.

Okada Keisuke diyakini terbunuh pada pemberontakan tersebut. Namun, upaya pembunuhan pemberontakan tersebut akhirnya dianggap gagal mencapai tujuannya karena salah membunuh saudara iparnya, Kolonel Matsuo Denzo yang terlihat mirip, sementara Okada diketahui selamat beberapa hari kemudian. Takahashi Korekiyo dikonfirmasi tewas sehari kemudian. Saito Makoto juga dikonfirmasi terbunuh di kediaman pribadinya. Begitu pula dengan, Watanabe Jotaro. Makino Nobuaki berhasil selamat dari percobaan pembunuhan tersebut, setelah keberadaannya tidak ditemukan beberapa hari sejak upaya kudeta setelah lari dari Yugawara. Suzuki Kantaro selamat pada peristiwa tersebut walau menderita luka parah. Dikemudian hari, ia berkontribusi sebagai Perdana Menteri terakhir Kekaisaran Jepang pada tahun 1945 dan cukup berpengaruh dalam menentukan Jepang memutuskan penyerahan kepada sekutu pada perang dunia 2.²⁵

Pasukan pemberontak juga menduduki gedung markas Polisi Metropolitan, yang menghadap ke parit selatan istana kekaisaran. Mereka juga berencana untuk menduduki istana kekaisaran demi memperoleh dukungan kaisar tetapi gagal dan peluang para pemberontak untuk mendapatkan Kaisar hilang.²⁶

Pada hari pertama pemberontakan tersebut, pemberontak mendatangi rumah dinas Menteri Perang untuk bertemu Menteri Perang Jenderal Kawashima Yoshiyuki. Diajukan Manifesto Pemberontakan (*kekki shuisho*) dan "tuntutan kepada Menteri Angkatan Darat" (*Rikugun daijin*

yōbō jikō). Tuntutan meminta menteri untuk mencegah penggunaan cara kekerasan terhadap pemberontak. Menangkap Jenderal Ugaki, Koiso, dan Tatekawa karena keterlibatan mereka dalam Insiden Maret. Memberhentikan dari dinas militer beberapa tokoh *Toseiha*. Menunjuk Jenderal Araki sebagai komandan Tentara Kwantung, untuk menjalankan "kebijakan keras terhadap Rusia". Serta memanggil beberapa rekan pemberontak ke Tokyo, untuk "berkonsultasi". Mereka juga menuntut dibentuknya "kabinet baru yang kuat" dibawah jenderal *Kodoha*.²⁷

Disepanjang 26 Februari pasukan pemberontak menduduki beberapa area kunci pemerintahan di wilayah Nagatacho, Tokyo. Lokasi-lokasi yang diduduki secara umum merupakan titik-titik yang menjadi target awal gerakan pemberontakan tersebut, seperti Rumah Dinas Perdana Menteri, Gedung Parlemen, Kantor Menteri Peperangan dan Markas Besar Kepolisian. Pasukan pemberontak juga menduduki Restoran Koraku dan Hotel Sanno.

Pemerintahan Jepang kemudian menerapkan proklamasi darurat militer di tokyo.²⁸ Ketika pemberontakan pecah, Dewan Militer Angkatan Darat mengeluarkan proklamasi yang menjawab tujuan pemberontak. Proklamasi Menteri Perang (*Rikugun daijin kokuji*) disetujui oleh semua anggota. Isi deklarasi tersebut cenderung ambigu dan dianggap mendukung pemberontakan.²⁹

Sementara itu dalam angkatan laut, marinir dan armada diperintah untuk untuk menjaga komplek milik angkatan laut. Tanggal 26 Februari, Staf Angkatan Laut memanggil Armada Pertama dan Kedua, yang sedang melakukan manuver di lepas pantai Shikoku, ke Tokyo dan Osaka. Armada Pertama, berjumlah sekitar empat puluh kapal, memasuki Teluk Tokyo pada sore hari tanggal 27 Februari dan mengambil posisi di sepanjang tepi laut kota. Armada kedua bersiaga di pesisir Osaka. Marinir diterjunkan dan dikirim untuk melindungi instalasi angkatan laut.³⁰ Pihak angkatan laut mengkritik sikap Menteri Angkatan Darat dan Dewan Tertinggi Militer yang mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan kehendak kaisar. Mereka menentang tindakan perwira tinggi *Kodoha* yang dianggap melecehkan kekuasaan kaisar dengan membuat pernyataan tanpa sepengetahuan kaisar. Proklamasi tersebut menyinggung Angkatan Laut, karena dengan menyetujui tindakan para pemberontak menyiratkan bahwa upaya pembunuhan ketiga laksamana (Okada, Suzuki, Saito) mendapat dukungan Angkatan Darat.

Perwira anti-*Kodoha* yang meskipun menjadi kelompok mayoritas di Staf Jenderal, kurang serius menghentikan pemberontakan. Ada kemungkinan bahwa Staf Jenderal memang menginginkan pecahnya pemberontakan, sehingga mereka memiliki kesempatan

²² Shillony, Ben Ami. *op. cit.*, hlm. 123-124

²³ *Ibid.*, hlm. 133

²⁴ *Ibid.*, hlm. 130

²⁵ *Ibid.*, hlm. 138.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 142.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 148.

²⁸ *The Nippon Jiji*, 26 Februari 1936.

²⁹ Shillony, Ben Ami. *op. cit.*, hlm. 152-156

³⁰ *The Nippon Jiji*, 28 Februari 1936.

untuk menghancurkan Gerakan Perwira Muda dan dengan demikian menghilangkan sisa-sisa terakhir pengaruh *Kodoha* di Angkatan Darat.

Sementara itu, Kaisar tetap bersikeras menolak untuk menyetujui visi restorasi dan menentang tegas pemberontakan. Kaisar, Angkatan Laut dan staff jenderal yang didominasi oleh golongan *Toseiha*, menentang keras tindakan kudeta. Pada akhirnya tentara-tentara kudeta tersebut secara resmi dianggap sebagai pemberontak (*hanran*).

Pagi hari tanggal 28 Februari, Staf Jenderal mengadakan rapat gabungan dengan komando darurat militer untuk membahas cara-cara menumpas pemberontakan. Pada sore harinya, pasukan kekaisaran diperintah untuk mengepung posisi pemberontak dengan dukungan tank dan artileri serta bersiap untuk serangan keesokan paginya. Pada malam hari tanggal 28 Februari, diumumkan di radio bahwa para perwira yang menyebabkan "gangguan" dan menentang Perintah Kekaisaran harus ditumpas dengan paksa. Siang tanggal 29 Februari, Kelompok Perwira Muda memutuskan untuk menyerah, semua bintang dan prajurit di bawah komando pemberontak telah dikembalikan ke barak.

Perwira Muda menghentikan aksinya karena merasa dikecewakan oleh para Jenderal *Kodoha*. Para jenderal, mengetahui bahwa Kaisar menentang pemberontakan dan dianggap takut akan masa depan karir mereka, menarik dukungan dari pemberontakan. Dalam situasi tersebut para pemberontak memutuskan untuk mundur dari daerah pendudukan karena merasa tidak menemukan alasan untuk lebih membahayakan nyawa prajurit yang mereka pimpin.

Diantara yang terlibat dalam pemberontak tersebut, terdapat perwira yang melakukan percobaan bunuh diri. Perwira yang lain dengan tegas menolak untuk bunuh diri. salah seorang pelaku menyatakan bahwa para perwira pemberontak tidak melakukan bunuh diri karena mengharapkan pengadilan publik seperti yang terjadi pada persidangan Aizawa. Mereka bermaksud menggunakan ruang sidang sebagai forum untuk membangkitkan kembali Restorasi Showa dan mengembalikan simpati publik.

Berkembangnya Militarisme Pasca Ni Ni-Roku

Pada tanggal 4 Maret, Kaisar menandatangani peraturan yang membentuk Pengadilan Militer Khusus (*tokubetsu gumpo kaigi*) untuk mengadili para pemberontak dan kolaboratornya. Pengadilan Militer Khusus ini berformat rahasia, cepat, dan tanpa pembela. Putusannya final dan tidak dapat diajukan banding.³¹

Semua 1.483 pelaku yang ikut serta dalam pemberontakan diinterogasi, tetapi hanya 124 orang yang diadili. Diantaranya yang diadili adalah seluruh 19 perwira yang memimpin pemberontakan (dari 21 pelaku, karena 2 diantaranya telah bunuh diri), 73 bintang (dari 91 bintang), 19

prajurit (dari 1.358 prajurit), dan 10 warga sipil.³²

Setelah serangkaian persidangan singkat dan tertutup. Putusan dijatuhkan pada 5 Juli pukul 2 pagi, 17 pemimpin pemberontakan yang masih hidup, terdiri dari 12 perwira dan 5 kolaborator sipil, dinyatakan bersalah atas pemberontakan dan dieksekusi dengan regu tembak. 5 perwira dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Beberapa bintang, tentara berpangkat lebih rendah dan kolaborator sipil lainnya dijatuhi hukuman penjara dengan berbagai jangka waktu yang berbeda. Pada bulan-bulan berikutnya, Pengadilan Militer Khusus juga mengadili berbagai kolaborator pemberontak.³³ Beberapa minggu sebelum diputuskannya persidangan untuk kudeta februari tersebut, Letnan Kolonel Aizawa Saburō juga dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan Nagata.³⁴ Kita Ikki sebagai penggagas Restorasi Showa juga dieksekusi pada tahun 1937 bersama dengan pelopor gerakan perwira muda yang lain.³⁵

Sebagian besar prajurit dan sekitar seperlima bintang kemudian dibebaskan dengan alasan bahwa mereka hanya bertindak atas perintah. mereka bergabung kembali dengan Divisi Pertama, dan dipindahkan ke Manchuria pada bulan Mei. Sekitar lima ratus perwira, yang sebagian besar simpatisan *Kodoha*, termasuk beberapa jenderal, diberhentikan dari dinas militer aktif atau dikirim ke posisi jauh dari ibukota.³⁶ Hal ini dilakukan dengan maksud sehingga kelompok perwira tersebut tidak lagi mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah pusat.

Faksi *Kodoha* kehilangan pengaruhnya di dalam ketentaraan. Sementara Faksi *Toseiha* semakin memperoleh pengaruh dalam pemerintahan sipil. Dengan kegagalan terakhir *Kodoha* setelah Insiden 26 Februari, *Toseiha* secara efektif tidak lagi eksis sebagai sebuah faksi, karena alasan keberadaannya sebagai kelompok oposisi *Kodoha* telah lenyap sejalan dibersihkannya *Kodoha* dari tubuh Angkatan Darat.

Di masa ini elemen-elemen militerisme di Jepang dapat dikatakan menguat. Setelah kudeta *Ni Ni-Roku*, Angkatan Darat pada awalnya didiskreditkan oleh kekacauan di satuannya. Walau kursi perdana Menteri dipercayakan pada Hirota Koki yang disebutkan memiliki kecenderungan liberal. sejak awal pembentukan kabinet Hirota tersebut justru cenderung dipengaruhi oleh angkatan darat.³⁷

Seiring berjalannya waktu, dengan dalih mencegah pemberontakan, Angkatan Darat menuntut kepada pemerintah sipil anggaran yang lebih besar. Mengambil keuntungan dari ketakutan pemerintah akan pergolakan militer lainnya, angkatan darat membujuk Kabinet Hirota untuk mengadopsi kebijakan perluasan persenjataan dan kontrol pemerintah.³⁸

Pembentukan kabinet Jepang pada masa itu memiliki

³¹ *The Nippon Jiji*, 4 Maret 1936.

³² *Nichibei Shinbun*, 8 Juli 1936.

³³ Shillony, Ben Ami. *op. cit.*, hlm. 201.

³⁴ *Nichibei Shinbun*, 4 Juli 1936.

³⁵ *Nichibei Shinbun*, 16 Agustus 1937.

³⁶ *The Nippon Jiji*, 6 Maret 1936.

³⁷ *Nichibei Shinbun*, 6 Maret 1936.

³⁸ *The Nippon Jiji*, 8 April 1936.

kebijakan bahwa hanya perwira aktif yang dapat mengisi jabatan Menteri Angkatan Darat (atau disebut kementerian perang) dan Menteri Angkatan Laut. Kebijakan tersebut telah diterapkan sejak restorasi Meiji dan sempat dinonaktifkan pada 1913. Kebijakan tersebut diaktifkan kembali oleh kabinet Hirota atas dorongan Menteri Angkatan Darat sebagai akibat dari peristiwa *Ni Ni-Roku*.

Pada tanggal 23 Januari 1937, Kabinet Hirota Koki mengundurkan diri. Pada 25 Januari, Jenderal Angkatan Darat Kazushige Ugaki diperintahkan untuk membentuk kabinet baru. Ugaki yang sedang menyusun anggota Kabinet, menghadapi oposisi dari beberapa pihak, khususnya dari Angkatan darat. Dalam rapat petinggi Angkatan Darat, diputuskan untuk tidak merekomendasikan siapa pun untuk menjadi Menteri Angkatan Darat berikutnya.³⁹ Tanpa bisa mengamankan personel untuk posisi Menteri Angkatan Darat, Ugaki tidak bisa membentuk kabinet. Pada akhir Januari, Ugaki secara resmi mencabut pencalonannya sebagai Perdana Menteri. Memasuki bulan Februari 1937, Jenderal Hayashi Senjuro dengan dukungan Angkatan Darat yang menjadi Perdana Menteri.⁴⁰

Setelah peristiwa ini, militer menyadari bahwa mereka dapat mengambil keuntungan dari sistem yang hanya mewajibkan perwira aktif untuk menjabat sebagai Menteri Angkatan Darat dan Angkatan Laut sebagai sarana untuk menggulingkan kabinet yang tidak mereka setujui. Dalam hal ini berarti bahwa pembentukan kabinet dan penerapan kebijakan Jepang kedepannya secara tidak langsung dipengaruhi oleh persetujuan militer.

Jepang juga mengalami peningkatan pengeluaran Angkatan perang. Peningkatan biaya persenjataan Jepang 3 tahun sebelum 1936 tercatat dalam rentang rasio sekitar 8% hingga 22%. Pengeluaran tersebut juga tidak lebih dari 80 juta yen. Tetapi pasca semakin berpengaruhnya militer sejak 1936, rasio tersebut meningkat drastis mulai dari 93% hingga 160% dalam 2 tahun, dengan pengeluaran melampaui 150 juta yen. Dan walaupun rasio peningkatan ini turun kembali di tahun-tahun selanjutnya, tetapi angka pengeluaran tersebut masih terus membengkak beberapa kali lipat sejak tahun 1936.⁴¹

Doktrin ekspansi Jepang juga dipengaruhi oleh peristiwa ini. Sebelum perang dunia kedua, ada dua doktrin ekspansi yang bersaing, *Hokushin-ron* dan *Nanshin-ron*. *Hokushin-ron* ("Doktrin Ekspansi Utara") berfokus pada Manchuria dan Siberia. *Nanshin-ron* ("Doktrin Ekspansi Selatan") memandang Pasifik dan Asia Tenggara sebagai potensi ekonomi Kekaisaran Jepang.

Terdapat banyak aktivis muda yang sangat mendukung strategi *Hokushin-ron* terhadap Uni Soviet yang terhimpun dalam faksi *Kodoha*. Untuk mengimbangi hal tersebut, faksi *Toseiha* (faksi Kontrol) berusaha untuk

memaksakan disiplin yang lebih besar atas Angkatan Darat dan perang dengan Cina sebagai keharusan strategis.

Banyak perwira dari kedua faksi tersebut sebenarnya setuju bahwa musuh utama Jepang adalah Uni Soviet. *Toseiha* tidak sependapat dengan *Kodoha* tentang apa yang diperlukan sebelum perang dengan Jepang di Uni Soviet. *Kodoha* mendukung kebijakan perdamaian dengan Cina, menghemat kekuatan Jepang untuk perang dengan Uni Soviet dan investasi dalam jumlah pasukan untuk perang dalam beberapa tahun mendatang. Sementara *Toseiha* lebih cenderung berpandangan bahwa Jepang membutuhkan akses ke sumber daya Cina untuk membangun basis industri sehingga Jepang bisa mandiri sebagai negara ekonomi autarkis, sebelum mampu mengobarkan perang total dengan Uni Soviet.⁴² Dalam hal ini, *Toseiha* lebih moderat dan berhati-hati dalam merencanakan perang melawan Uni Soviet, sementara *Kodoha* cenderung lebih radikal dalam menuntut konfrontasi sesegera mungkin.⁴³

Kelompok perwira muda yang terlibat dalam peristiwa *Ni Ni-Roku*, juga mengklaim bahwa *Kodoha* menentang *Toseiha* dalam meningkatkan hubungan diplomatik dengan Rusia.⁴⁴ Maka dapat dikatakan faksi *Kodoha* mendukung secara penuh doktrin *Hokushin-ron*. Sementara faksi *Toseiha* yang berpandangan bahwa arah ekspansi Jepang menyesuaikan dengan kebutuhan sumber daya dan industri, lebih fleksibel dalam penerapan doktrin ekspansinya, sehingga masih dapat mempertimbangkan opsi yang lain, dalam hal ini misalnya seperti doktrin ekspansi ke selatan atau *Nanshin-ron*.

Pasca kudeta dalam *Ni-Roku* tahun 1936, Faksi *Toseiha* merebut banyak pengaruh di Angkatan darat. Hal ini menjadi salah satu alasan utama mengapa Jepang akhirnya mengobarkan perang ke Cina segera setelah itu, bukan ke Uni Soviet. Konfrontasi kecil yang meletus di sekitar Jembatan Marco Polo, pada akhirnya menyebabkan pecahnya Perang Sino-Jepang Kedua. Dapat dikatakan, terlepas dari pendapat pemerintah pusat di Tokyo, situasi kemana arah ekspansi Jepang sangat bergantung pada para perwira di lapangan. Akibat dari sifat militer Jepang yang saling berselisih, para pemimpin dan kelompok militer membuat keputusan kebijakan luar negeri yang agresif tanpa persetujuan dari pemerintah.

Akibat dari sepak terjang faksionalisme yang panjang, Angkatan Laut Kekaisaran tidak setuju dengan *Hokushin-ron* yang dipromosikan oleh sebagian Angkatan Darat. Melihat kesempatan untuk menggantikan kekuatan Angkatan Darat dalam dominasi perang, Angkatan Laut mulai mempromosikan *Nanshin-ron* sebagai alternatif doktrin yang dianggap lebih bermanfaat.⁴⁵

Pada pertengahan tahun 1940, Pemerintah Jepang akhirnya berkomitmen untuk meluncurkan serangan militer

³⁹ *Kashu Mainichi Shinbun*, 26 Januari 1937.

⁴⁰ *The Nippon Jiji*, 2 Februari 1937.

⁴¹ Salavrakos, I. D. 2018. A re-assessment of the Japanese armaments production during World War II. *Defence and Peace Economics*, hlm. 879.

⁴² Guo, S. 2020. Japan's War on Three Fronts Prior to 1941. *Bound Away: The Liberty Journal of History*, hlm. 4.

⁴³ *Shin Sekai Asahi Shinbun*, 4 Maret 1936.

⁴⁴ Shillony, Ben Ami. *op. cit.*, hlm.38.

⁴⁵ Guo, S. *op. cit.*, hlm. 12.

ke arah selatan. Faktor yang cukup menentukan keputusan ini adalah perubahan sikap Angkatan Darat. Angkatan Darat sebelumnya yang terpecah antara hanya fokus ke utara (Rusia) atau perang dengan Cina.⁴⁶ Ketika perpecahan pendapat akibat faksionalisme tersebut diakhiri dengan dibersihkannya faksi *Kodoha*, dan Faksi Angkatan darat yang berkuasa kemudian mengobarkan perang dengan Cina, perang itu sendiri menemui jalan buntu. Sehingga alternatif ekspansi ke selatan yang didukung Angkatan laut mulai diadopsi secara resmi oleh pemerintah Jepang.

Pada saat perang dunia kedua dimulai, Jepang telah melemah luar dan dalam negeri. Sehingga kekurangan dan kekalahan Jepang dalam upaya perang dan pendudukan di asia pada perang pasifik dapat dikaitkan sejak era konflik faksionalisme.

PENUTUP

Kesimpulan

Peristiwa *Ni Ni-Roku* (2-26) adalah percobaan kudeta militer dan pembunuhan tokoh politik oleh sekelompok perwira muda Angkatan Darat Kekaisaran Jepang pada 26 Februari 1936 dilatarbelakangi oleh visi Restorasi Showa. Gerakan Restorasi Showa ini berusaha tidak hanya mengembalikan Kaisar Hirohito ke kekuasaan absolut, tetapi juga secara radikal mengubah sistem sosial, ekonomi, dan politik Kekaisaran Jepang. Dilatarbelakangi oleh kesulitan ekonomi masyarakat serta kesenjangan sosial, memburuknya hubungan internasional Jepang, dan adanya gesekan ideologi politik beberapa golongan di dalam pemerintahan serta militer Jepang. Gerakan tersebut berusaha meruntuhkan fondasi demokrasi Jepang era Taisho.

Perpecahan faksionalisme muncul dalam tubuh angkatan darat yang masing-masing mendukung dan menolak Gerakan Restorasi Showa. Faksi *Kodoha* yang mendukung gerakan melahirkan perkumpulan aktivis perwira muda (*Seinen Shoko Undo*).

Peristiwa *Ni Ni-Roku* (Insiden 26 Februari) menjadi salah satu dari upaya pemberontakan dan pembunuhan perwira muda. Pemberontakan tersebut pecah pada 26 Februari 1936, melibatkan sekitar 1.400 tentara Divisi Pertama Angkatan Darat yang ditempatkan di Tokyo. Pasukan tersebut mengepung dan menduduki gedung parlemen Jepang, kediaman perdana menteri, gedung Kementerian Perang, Markas Besar Kepolisian, Restoran Koraku, dan Hotel Sanno. Regu pembunuh juga dikirim untuk mencari dan membunuh sejumlah pejabat tinggi atau mantan pejabat tinggi pemerintah, seperti Bendaharawan Agung Kekaisaran Laksamana Suzuki Kantaro, Penjaga Segel Kerajaan Laksamana Saito Makoto, Inspektur Jenderal Akademi Militer Watanabe Jotaro, dan mantan Penjaga Segel Kekaisaran Makino Nobuaki.

Para perwira muda berhasil membunuh beberapa

pejabat penting dan memperoleh dukungan dari beberapa jenderal angkatan darat. Pada akhirnya pemberontakan tersebut gagal karena Kaisar menuntut bahwa tentara menghentikan pemberontakan. Tanpa dukungan kaisar dan mundurnya dukungan dari para jenderal akibat tuntutan kaisar, tentara pemberontak menyerah.

Setelah Insiden 26 Februari, perwira *Kodoha* dinonaktifkan dari dinas militer. Perwira muda yang menjadi pelaku pemberontakan juga dihukum berat. Dengan dominasi *Kodoha* disingkirkan, *Toseiha* sebagai lawan politiknya secara efektif menjadi satu-satunya kelompok yang tersisa dalam Angkatan Darat dan mengambil alih kekosongan pengaruh yang diakibatkannya.

Pasca kudeta, angkatan darat memperkuat pengaruhnya dalam politik Jepang. kebijakan perwira aktif diterapkan kembali, yang secara tersirat mengisyaratkan bahwa kabinet Jepang hanya bisa dibentuk dengan persetujuan militer. Pasca tahun 1936, anggaran militer dan pengeluaran biaya perang juga ditingkatkan.

Faksionalisme dalam tubuh angkatan darat ini juga melibatkan doktrin ekspansi Jepang. faksionalisme tersebut memecah angkatan darat menjadi kubu *Kodoha* yang mendukung perang melawan Uni Soviet, serta kubu *Toseiha* yang mendukung perang melawan Cina. Dengan dibersihkannya golongan *Kodoha* pasca pemberontakan, angkatan darat yang dipengaruhi oleh *Toseiha* mengobarkan perang melawan Cina. Perang tersebut mengalami kebuntuan, sehingga pemerintah Jepang memilih mengikuti usul angkatan laut dengan mengubah haluan ekspansi menuju Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Saran

Berdasarkan penelitian mengenai *Peristiwa Ni Ni-Roku Tahun 1936 dan Hubungannya Terhadap Militarisme Jepang* ini, peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Melalui penelitian ini, peneliti menemukan bahwa terdapat perwira simpatisan Gerakan Restorasi Showa dan Gerakan Perwira Muda yang akhirnya ditempatkan di wilayah jajahan Jepang. Maka diharapkan terdapat penelitian mengenai hal tersebut yang secara spesifik menelusuri perwira-perwira *Kodoha* yang ditempatkan di Indonesia pada masa pendudukan Jepang.
2. Diperlukan adanya pemahaman bahwa terdapat gesekan kepentingan dan faksionalisme dalam tubuh militer Kekaisaran Jepang, yang berarti bahwa militer Jepang tidak sepenuhnya memiliki keseberagaman kebijakan atau agenda. Sehingga, jika ditilik dari sudut pandang Sejarah Indonesia, pemerintahan pendudukan militer Jepang di Indonesia yang

⁴⁶ Dick, H. 1989. Japan's economic expansion in the Netherlands Indies between the first and second World Wars. *Journal of Southeast Asian Studies*, hlm. 271.

dikendalikan oleh berbagai faksi militer juga tidak bisa digeneralisir sebagai representasi tunggal penjajahan Jepang dalam narasi Sejarah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

a. Surat Kabar Sejaman

- Kashu Mainichi Shinbun. *Silk: A Strong Thread in Japan's Destiny; Fortunes of Nation Depend Upon This Product*. Edisi 21 Agustus 1932. Los Angeles.
- Kashu Mainichi Shinbun. *Gen. Sadao Araki: Man of The Hour in Japan; Minister of War Expounds His View on Peace*. Edisi 19 Maret 1933. Los Angeles.
- Kashu Mainichi Shinbun. *Ugaki Unable to Form Cabinet, Army Opposes*. Edisi 26 Februari 1933. Los Angeles.
- Nichibei Shinbun. *Army Rule In Tokyo: Okada, Takahashi, Saito Killed by Assassins*. Edisi 27 Februari 1936. San Fransisco.
- Nichibei Shinbun. *Rebel Surrender!*. Edisi 28 Februari 1936. San Fransisco.
- Nichibei Shinbun. *Rebel Peace Pact Fails!*. Edisi 29 Februari 1936. San Fransisco.
- Nichibei Shinbun. *Okada Found Alive*. Edisi 1 Maret 1936. San Fransisco.
- Nichibei Shinbun. *Japan Crisis Remains At Standstill*. Edisi 2 Maret 1936. San Fransisco.
- Nichibei Shinbun. *National Policy Sought*. Edisi 3 Maret 1936. San Fransisco.
- Nichibei Shinbun. *War Council Quit; Tender Resignation*. Edisi 4 Maret 1936. San Fransisco.
- Nichibei Shinbun. *Rusia Ready to War, Stalin Defy*. Edisi 5 Maret 1936. San Fransisco.
- Nichibei Shinbun. *Hirota Named New Japan Prime Minister*. Edisi 6 Maret 1936. San Fransisco.
- Nichibei Shinbun. *Army Lieader balk As Hirota Picks Cabinet*. Edisi 7 Maret 1936. San Fransisco.
- Nichibei Shinbun. *New Premier Seeks Compromise; Meets with War Minister*. Edisi 8 Maret 1936. San Fransisco.
- Nichibei Shinbun. *Revolt Outbreak of Civil, Army Clash*. Edisi 9 Maret 1936. San Fransisco.
- Nichibei Shinbun. *Nipponese Cabinet Installed; Hirota's Choices Approved*. Edisi 10 Maret 1936. San Fransisco.
- Nichibei Shinbun. *First Photo of Tokyo Revolt!*. Edisi 11 Maret 1936. San Fransisco.
- Nichibei Shinbun. *Exclusion Act: After 12 Years*. Edisi 18 Mei 1936. San Fransisco.
- Nichibei Shinbun. *Lt. Col. Aizawa Executed For Nagata Murder*. Edisi 4 Juli 1936. San Fransisco.
- Nichibei Shinbun. *17 Tokyo Army Revolt Leaders To Die*. Edisi 8 Juli 1936. San Fransisco.
- Nichibei Shinbun. *Nipponese Consider State Ownership*. Edisi 25 Januari 1937. San Fransisco.
- Nichibei Shinbun. *Uprising Army Given Leaders Verdict*. Edisi 16 Agustus 1937. San Fransisco.
- Shin Sekai Asahi Shinbun. *Assassin Reveals Opposing Factions In Japan Military*. Edisi 29 Januari 1936. San Fransisco.
- Shin Sekai Asahi Shinbun. *Entire Nippon Agog Over Army Coup d'Etat, Premier Is Slain*. Edisi 27 Februari 1936. San Fransisco.
- Shin Sekai Asahi Shinbun. *Rebel Leave, City Normal; Council Moots Next Regime*. Edisi 28 Februari 1936. San Fransisco.
- Shin Sekai Asahi Shinbun. *Compromise Fails, Rebels Hold Own*. Edisi 29 Februari 1936. San Fransisco.
- Shin Sekai Asahi Shinbun. *Tokyo Upheaval Dies: Young Rebel Leaders Ousted*. Edisi 2 Maret 1936. San Fransisco.
- Shin Sekai Asahi Shinbun. *Suicide List Grows Out of 'Wednesday Coup' in Japan*. Edisi 3 Maret 1936. San Fransisco.
- Shin Sekai Asahi Shinbun. *Saionji Confers With Emperor on National Crisis*. Edisi 4 Maret 1936. San Fransisco.
- Shin Sekai Asahi Shinbun. *Emperor Create Special Military Tribunal to Try Rebel Soldiers*. Edisi 5 Maret 1936. San Fransisco.
- Shin Sekai Asahi Shinbun. *Hirota Ordered to Form New Cabinet, Announcement Surprising But Pleasant*. Edisi 6 Maret 1936. San Fransisco.
- Shin Sekai Asahi Shinbun. *Envoy to Moscow Assures Coup Has No Effect on Tie*. Edisi 7 Maret 1936. San Fransisco.
- Shin Sekai Asahi Shinbun. *New Hirota Cabinet Organized*. Edisi 10 Maret 1936. San Fransisco.
- Shin Sekai Asahi Shinbun. *Tomii Talks of New Japan Chief, Hirota*. Edisi 11 Maret 1936. San Fransisco.
- Shin Sekai Asahi Shinbun. *Colonel Aizawa, Killer of Superior Nagata, Must die, Nippon Court Martial Rules*. Edisi 2 Juli 1936. San Fransisco.
- Shin Sekai Asahi Shinbun. *Four Feb.26 Leaders Executed*. Edisi 20 Agustus 1937. San Fransisco.
- Shin Sekai Asahi Shinbun. *End Soviet Influence In Orient, Araki Urges*. Edisi 1 Mei 1938. San Fransisco.
- The Nippu Jiji. *Araki Lead New Political Move*. Edisi 4 Oktober 1932. Honolulu.
- The Nippu Jiji. *Civilian Defendants In May 15 Case Go On Trial At Tokyo Today*. Edisi 26 September 1933. Honolulu.
- The Nippu Jiji. *Trial Of Army Officer Slayer Opens In Tokyo; Aizawa Soys He Killed Nagata for Blocking "Showa Restoration"*. Edisi 28 Januari 1936. Honolulu.
- The Nippu Jiji. *Assasin Testifies He Killed Nagata To Save Japan Army From Crisis*. Edisi 30 Januari 1936. Honolulu.
- The Nippu Jiji. *Tokyo Under Martial Law As Premier*

- Okada, *Other Officials Are Slain*. Edisi 26 Februari 1936. Honolulu.
- The Nippu Jiji. *Tokyo Is Quiet After Terrorism; Finance Situation Calm; Saionji To Help Ruler In Naming Premier*. Edisi 27 Februari 1936. Honolulu.
- The Nippu Jiji. *Navy Parties Land In Tokyo Uprising*. Edisi 28 Februari 1936. Honolulu.
- The Nippu Jiji. *Saionji Reaches Tokyo To Help Pick Premier; Capital Normal Again*. Edisi 2 Maret 1936. Honolulu.
- The Nippu Jiji. *1,430 Took Part In Revolt, Says Official Communique; Rebels To Have Speedy Trial*. Edisi 4 Maret 1936. Honolulu.
- The Nippu Jiji. *Hirota Is Appointed Japan's Premier; War Officials Are Satisfied*. Edisi 5 Maret 1936. Honolulu.
- The Nippu Jiji. *Completion Of Hirota Cabinet Hits Snag As Army Raises Protest*. Edisi 6 Maret 1936. Honolulu.
- The Nippu Jiji. *Collapse of League of Nations Looms*. Edisi 11 Maret 1936. Honolulu.
- The Nippu Jiji. *Tokyo Revolt Held Stain On Japan History*. Edisi 8 April 1936. Honolulu.
- The Nippu Jiji. 1937. *Hayashi Compromises With Military In Appointing His Ministers Of War And Navy*. Edisi 1 Februari 1937. Honolulu.
- The Nippu Jiji. *Tokyo Executes Four Civilians In 1936 Army Revolt*. Edisi 19 Agustus 1937. Honolulu.
- b. Jurnal, Artikel, dan Penelitian :**
- Bridges, B. 1980. Yoshizawa Kenkichi and the Soviet—Japanese Non-aggression Pact Proposal. *Modern Asian Studies*, 14(1), 111-127.
- Burkman, T. 1980. The Paradox of Pacifism and Powerhood in the Japanese League of Nations Movement. *Peace & Change*, 6(1-2), 43-48.
- Colegrove, K. 1941. The new order in East Asia. *The Journal of Asian Studies*, 1(1), 5-24.
- Crowley, J. B. 1962. Japanese Army Factionalism in the Early 1930's. *The Journal of Asian Studies*, 21(3), 309-326.
- Dick, H. 1989. Japan's economic expansion in the Netherlands Indies between the first and second World Wars. *Journal of Southeast Asian Studies*, 20(2), 244-272.
- Duus, P., & Okimoto, D. I. 1979. Fascism and the history of pre-war Japan: the failure of a concept. *The Journal of Asian Studies*, 39(1), 65-76.
- Fletcher, M. 1979. Intellectuals and Fascism in Early Shōwa Japan. *The Journal of Asian Studies*, 39(1), 39-63.
- Guo, S. 2020. Japan's War on Three Fronts Prior to 1941. *Bound Away: The Liberty Journal of History*, 3(1), 2.
- Kublin, H. 1952. The Origins of Japanese Socialist Tradition. *The Journal of Politics*, 14(2), 257-280.
- Kustiawan. 2011. Analisa Politik Kegagalan 'Restorasi Showa' Dalam Peristiwa 26 Pebruari (1936) (Studi Tentang Peran Politik Militer Jepang pada Pemerintahan Showa). *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1-16.
- McCormack, G. 1980. 1930s Japan: Fascist?. *Social Analysis: The International Journal of Social and Cultural Practice*, (5/6), 125-143.
- Orbach, D. 2011. A Japanese prophet: eschatology and epistemology in the thought of Kita Ikki. *Japan Forum*. 23(3), 339-361.
- Pałasz-Rutkowska, E. 2015. General Masaki Jinzaburō and the Imperial Way Faction (Kodoha) in the Japanese Army 1932-1936—Part Two. *Analecta Nipponica*, (5), 139-183.
- Person, J. 2020. The Showa Restoration movement in transwar perspective: the case of Kageyama Masaharu, 1910–1979. *Japan Forum*, 34(4), 514-537.
- Power, J. E. 1942. The Japanese Constitution and the Militarists. *Pacific Affairs*, 15(2), 188-194.
- Salavrakos, I. D. 2018. A re-assessment of the Japanese armaments production during World War II. *Defence and Peace Economics*, 29(7), 871-885.
- Sheldon, C. D. 1976. Japanese aggression and the Emperor, 1931–1941, from contemporary diaries. *Modern Asian Studies*, 10(1), 1-40.
- Siniawer, E. M. 2011. Liberalism Undone: Discourses on Political Violence in Interwar Japan. *Modern Asian Studies*, 45(4), 973-1002.
- Suherman, E. 2004. Dinamika Masyarakat Jepang dari Masa Edo Hingga Pascaperang Dunia II. *Humaniora*, 16(2), 201-210.
- Wang, Z. 2022. Hakkō Ichū: Religious Rhetoric in Imperial Japan. *Religions*, 14(1), 21-36.
- Wilson, G. M. 1966. Kita Ikki's Theory of Revolution. *The Journal of Asian Studies*, 26(1), 89-99.
- Xu, B. 2018. The Triple Intervention: A Forgotten Memory in the Discourse of the Nineteenth Century's International Law. *JE Asia & Int'l L.*, 11, 375.
- Nish, I. 1993. *The uncertainties of isolation: Japan between the wars*. London: University of London.
- Segal, E. 2015. *Meiji and Taishō Japan: An Introductory Essay*. Michigan: Michigan State University.
- c. Buku :**
- Beasley, W. G. 2001. *Rise of Modern Japan: Political, Economic and Social Change Since 1850*. London: Phoenix.
- Kawakami. 1919. *Japan and World Peace*. New York : Macmillan.
- Kuromiya, Hiroaki. 2022. *Stalin, Japan, and the Struggle for Supremacy over Cina, 1894–1945*. London: Routledge.

- Ojong, P.K. 2001. *Perang Pasifik*, Jakarta: Kompas.
- Oktorino, Nino. 2013. *Konflik Bersejarah: Runtuhnya Hindia Belanda*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sims, Richard. 2001. *Japanese Political History Since the Meiji Restoration, 1868-2000*. New York: Palgrave.
- Shillony, Ben Ami. 1973. *Revolt in Japan: The Young Officers and the February 26, 1936 Incident*. New Jersey: Princeton University Press.
- Shillony, Ben Ami. 1991. *Politics and Culture in Wartime Japan*. Oxford: Clarendon Press.
- Toland, John. 2003. *The Rising Sun: The Decline and Fall of the Japanese Empire, 1936-1945*. New York: The Modern Library.
- Skya, Walter. 2009. *Japan's Holy War: the ideology of radical shinto ultranationalism*. Durham: Duke University Press.

d. Website :

- Japan Center for Asian Historical Records, *Situation within Japan*. <https://www.jacar.go.jp/english/nichibei/negotiation/index3.html> diakses pada 10 Januari 2023.
- Japan Center for Asian Historical Records, <https://www.jacar.go.jp/learning/menu05.html> diakses pada 9 Juni 2023.
- Modern Japan in Archives, *Crisis in Constitutional Politics* <https://www.jacar.go.jp/english/nichibei/negotiation/index3.html> diakses pada 1 Juni 2023.
- Ryota, Murai. 2014. *The Rise and Fall of Taishō Democracy: Party Politics in Early-Twentieth-Century Japan*. <https://www.nippon.com/en/in-depth/a03302/> diakses pada 8 Januari 2023.
- Townsend, Susan. 2011. *Japan's Quest for Empire 1931 - 1945*. https://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwtw/o/japan_quest_empire_01.shtml diakses pada 23 Desember 2022.

